

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Infrastruktur di suatu negara merupakan salah satu tolak ukur perkembangan suatu negara. Jika pembangunan infrastruktur terus dilakukan, tentunya akan meningkatkan daya saing ekonomi di kancah nasional maupun internasional. Namun tujuan utama pembangunan infrastruktur di suatu negara tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Demi mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit dan dana tersebut bisa didapat dari penerimaan pemerintah. Di Indonesia, sumber utama penerimaan pemerintah berasal dari pajak dan dikarenakan pajak sebagai ujung tombak pembangunan Negara Indonesia, maka sudah sepatutnya sektor pajak didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurut Prastowo (2009) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan terakhir tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assesement System*. Menurut Rahayu (2010) *Self Assesement System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, yaitu

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak terutang. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu merupakan salah satu bentuk dukungan yang nyata oleh masyarakat untuk Negeranya. Sedangkan fiskus berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun dalam prakteknya, kesempatan untuk melakukan kecurangan dan kelalaian yang disengaja maupun yang tidak disengaja sangat besar, sehingga nantinya berdampak pada kerugian negara.

Contoh kasus di Jawa Timur, dari tahun 2017 hingga 2018 sudah tercatat 11 kasus korupsi oleh kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagian besar kepala daerah ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Kepala daerah yang menyandang status tersangka saat tengah menjabat antara lain adalah Wali Kota Madiun, Bupati Pamekasan, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Batu, Bupati Nganjuk, Bupati Jombang, Wali Kota Malang, Bupati Mojokerto, Bupati Tulungagung, Wali Kota Blitar dan Wali Kota Pasuruan.

([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com))

Sedangkan jika diambil dari tahun yang lebih jauh, yaitu dari tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 34 kepala daerah dari seluruh daerah yang berada di Indonesia. Faktor utama yang dinilai menyebabkan korupsi kepala daerah adalah lemahnya pengawasan dan biaya politik yang terlalu mahal. Penguatan aparat pengawas internal dinilai semakin mendesak. Bukan

hanya agar aparaturnya memahami bagaimana celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi, tetapi juga revitalisasi posisi pengawas internal yang selama ini tersandera dibawah kepala daerah. Inspektorat yang lebih independen diharapkan dapat memetakan siapa saja pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah. Kemudian melakukan kajian sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu. ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com))

Dari contoh kasus tersebut merupakan gambaran bagaimana korupsi begitu merugikan negara, tidak hanya jutaan, namun miliaran rupiah. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk meminimalisir terjadinya korupsi, contohnya dengan melakukan pengendalian internal yang kuat.

Pada hakekatnya, setiap kegiatan dalam organisasi ataupun usaha sangat memerlukan apa yang disebut dengan pengendalian. Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. (Mulyadi, 2007:89). Menurut Mamuja (2016) pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam suatu kepastian secara layak mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum.

Menurut Hasibuan (2014:75) tujuan melakukan pengendalian internal antara lain adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan dari rencana, melakukan tindakan jika terdapat penyimpangan, dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian bukan

ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, melainkan untuk memahami apa yang salah agar kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dalam mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal yang memadai di dalam pemerintahan, terutama yang diterapkan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya, kedepannya sangat berguna nantinya. Karena jika pengendalian internal baik, maka akan berdampak baik pada pertanggungjawaban pemerintah dan keterbukaan terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Penelitian-penelitian di Indonesia tentang pemerintahan daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah masih tergolong rendah, sehingga memengaruhi perumusan opini audit (Khasanah & Rahardjo, 2014). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dalam sejumlah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyebabnya adalah belum efektifnya sistem pengendalian internal di sektor publik, sehingga tujuan organisasi belum sepenuhnya tercapai.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan terkait pengendalian internal dengan akuntabilitas dan transparansi, antara lain: Abubakar dkk (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh secara terhadap akuntabilitas dan transparansi. Tetapi di penelitian lainnya, Sari, Ghozali &

Achmad (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas. Kewo (2017) mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Sari (2012) juga pernah melakukan penelitian yang mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal mempengaruhi transparansi dengan arah hubungan positif.

Sehubungan dengan pentingnya pengendalian internal di lingkungan pemerintahan dan adanya gap temuan penelitian sebelumnya, maka topik penelitian ini adalah “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Akuntabilitas dan Transparansi Publik (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya)”. Alasannya melakukan penelitian di Kota Surabaya didasarkan atas penghargaan-penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Surabaya. Dari beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya adalah penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah Republik Indonesia terkait kecakapannya dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2016 ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)). Dengan penghargaan diatas maka Kota Surabaya digunakan dalam penelitian ini sebagai contoh dengan kasus pengendalian internal yang paling bagus di Jawa Timur sehingga diharapkan dalam pengisian kuesioner yang disebar nantinya akan menjawab dengan jujur dan tidak ada yang dirahasiakan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi publik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
2. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu Akuntansi khususnya akuntansi sektor publik yang terkait dengan masalah-masalah terhadap pengendalian internal dalam hubungannya dengan akuntabilitas dan transparansi

## 2. Manfaat Empiris

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu berkontribusi pada perkembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, khususnya untuk memahami sistem pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya sehingga dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan sesuai dengan bahasan, yakni Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan serta Saran. Agar didapatkan gambaran secara jelas tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan secara garis besar kerangka pembahasan masing-masing bab sebagai berikut:

### Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pembahasan secara umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Pertama, latar belakang yang dijadikan dalam perumusan masalah dan tujuan penulisan skripsi ini. Latar belakang yang mendasari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi apakah akuntabilitas dan transparansi yang sudah diterapkan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya sudah efektif untuk

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan negara. Sedangkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan bagaimana peranan sistem pengendalian internal dalam pencapaian akuntabilitas dan transparansi publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan kejadian yang terjadi terkait sistem pengendalian internal yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, terutama untuk instansi yang berkaitan guna menjadi bahan evaluasi sehingga kedepannya dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik.

## Bab 2: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dimuat teori-teori yang digunakan sebagai landasan menyusun penelitian ini. Secara garis besar bab ini berisi teori tentang sistem pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, dan perpajakan secara umum. Dalam bab ini juga membahas tentang kerangka berpikir penelitian ini.

## Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data dan metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Dalam bab ini juga berisi jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dengan cara kuisioner, serta teknik analisis data.



#### Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum tentang objek dan subjek penelitian, analisis data, hasil analisa serta pembahasan secara rinci dan mendalam.

#### Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh peneliti selama proses penelitian berlangsung dari mulai mengumpulkan data, menganalisis data dan membahas informasi yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi penelitian selanjutnya.